



Foto oleh Nanang Sujana/CIFOR

Peran Forum Multipihak dalam Yurisdiksi Pemerintah Daerah



Forum Kelompok Kerja Multipihak SIPKEBUN

Kalimantan Tengah, Indonesia


Pesan Kunci :


- Anggota dari Forum Multipihak (Multi Stakeholder Forum, MSF) SIPKEBUN (*Sistem Informasi dan Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan*) mengakui bahwa keluarannya yaitu database SIPKEBUN, adalah sebuah alat yang efektif untuk mengetahui masalah-masalah umum terkait sektor kelapa sawit berkelanjutan yang dihadapi oleh petani dan pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Terlibatnya pemerintah daerah pada proses pengambilan keputusan dalam MSF dapat meningkatkan efektivitas hasil MSF karena peran strategis mereka dalam memengaruhi kebijakan dan peraturan di daerah.
- Efektivitas MSF dalam upaya mendapatkan sertifikasi terkait standar kelapa sawit keberlanjutan, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi petani kelapa sawit, terhambat karena sedikitnya perwakilan perusahaan dan tidak adanya perwakilan dari petani.

Sekilas MSF

Peserta	  
Penyelenggara	
Tahun dimulai	2015
Pendanaan	 
Tipe forum	Pengelolaan dan pengambilan keputusan
Hasil	Rekomendasi, koordinasi

 LSM

 Pemerintah Daerah

 Perusahaan

Pendahuluan

Pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-3 kehilangan hutan terbesar di dunia. Sebesar 339,888 hektar hutan di Indonesia hilang disebabkan oleh perubahan lahan untuk aktivitas pertanian (tanaman perkebunan), pembalakan liar, kebakaran hutan dan permukiman. Indonesia, bersama Malaysia, memegang peranan penting dalam industri global kelapa sawit dengan memasok sebesar 85-90% dari total volume produksi kelapa sawit di dunia. Di Indonesia, kelapa sawit berkontribusi sebesar 1.5-2.5% dari total produk domestik bruto (PDB), menempatkan industri ini sebagai salah satu industri terpenting di Indonesia. Namun, industri kelapa sawit menerima kritikan dari berbagai aktor global karena dampak negatifnya terhadap hutan.

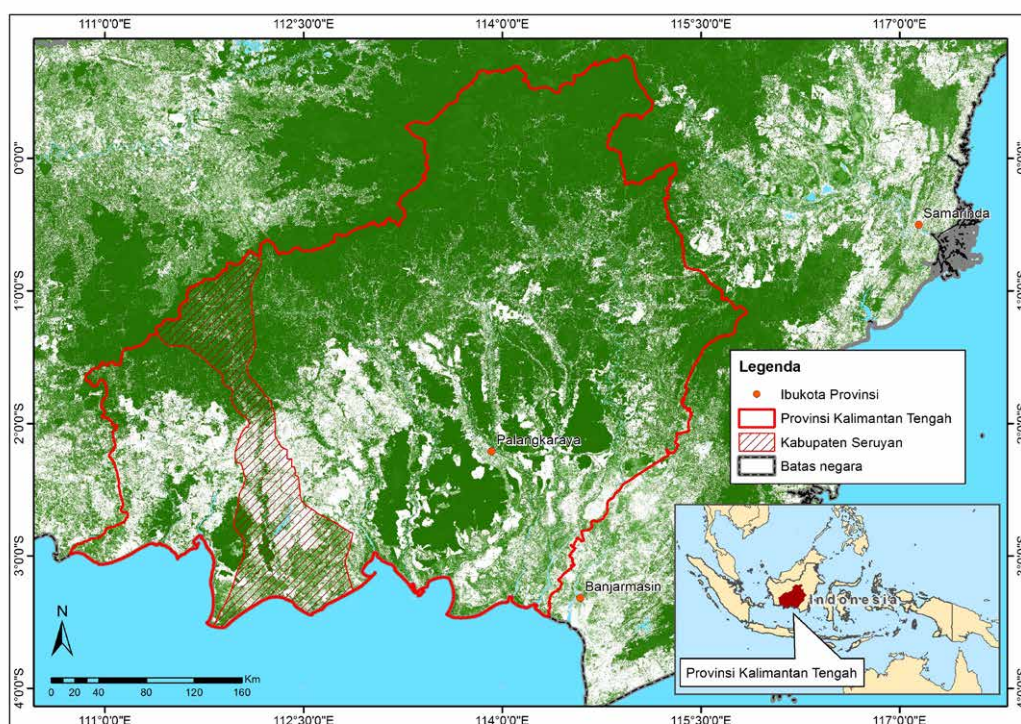
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenal sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan dan perluasan kelapa sawit yang tinggi. Lahan seluas 1.2 juta ha dari total 15.3 juta ha total wilayah provinsi telah ditanami kelapa sawit. Pemerintah provinsi Kalteng berencana untuk menambah luas wilayah penanaman sebesar 3.5 juta ha di tahun 2020. Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai pemerintah di Kabupaten Seruyan, industri kelapa sawit menjadi salah satu penggerak ekonomi kabupaten dengan lebih dari 5,700 petani kecil – dengan tingkat pengetahuan pengelolaan yang rendah – tergabung di dalamnya.

Sebelum disahkannya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan, seluruh wilayah hutan tanpa status kepemilikan yang jelas otomatis masuk dalam kategori kawasan hutan negara. Ini berlaku juga pada lahan milik petani meski mereka telah mengelolanya secara turun-temurun. Kondisi ini berdampak pada para petani di Seruyan yang setengah diantaranya memiliki lahan di dalam kawasan hutan negara sehingga kegiatan perkebunan yang mereka lakukan menjadi ilegal dengan

hasil panen yang sulit untuk mendapatkan sertifikasi ISPO/RSPO. Akibatnya, meski produk mereka masih bisa dijual di pasaran, namun harga jualnya lebih rendah dibanding dengan produk yang bersertifikasi.

Di tahun 2015, sebuah LSM bernama INOBU berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam program sertifikasi yurisdiksi, sebuah program yang didanai oleh Unilever, perusahaan multinasional yang berkomitmen untuk memasok kelapa sawit dan turunan kelapa sawit yang bersertifikasi. RSPO juga berkontribusi dalam memberikan dukungan bagi kelompok petani dalam mendapatkan sertifikasi RSPO tanpa biaya. **Kelompok kerja multipihak (MSF) SIPKEBUN kemudian dibentuk dengan tujuan untuk mendukung program sertifikasi yurisdiksi melalui pembuatan database sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan tumpang tindihnya masalah tenurial, mendorong praktik perkebunan berkelanjutan dan mendukung petani kecil untuk mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO yang dapat membantu para petani untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik.** Pemerintah Kabupaten Seruyan bercita-cita untuk membuat sebuah sistem yang dapat diakses dengan mudah untuk memantau aktivitas perkebunan kelapa sawit independen baik di dalam hutan negara maupun di 'areal penggunaan lain'. Informasi yang disimpan di dalam sistem tersebut akan memuat informasi penting termasuk titik lokasi geografis, luas lahan perkebunan, status kepemilikan lahan, identitas petani pemilik perkebunan beserta dokumen pengkajian lingkungan dan legal lainnya. Pemerintah kabupaten Seruyan yang juga menjadi anggota dari MSF menyatakan pentingnya database sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan.

Dalam studi ini, wawancara mendalam dilakukan dengan 7 peserta MSF, 5 nonpeserta MSF, 1 penyelenggara MSF dan 4 informan kunci dari berbagai sektor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang tata guna lahan



Gambar 1. Lokasi studi: Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. Lahan terbuka di Kalimantan Tengah. Foto oleh Nanang Sujana/CIFOR.

dan alih fungsi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari studi ini adalah:

1. mengidentifikasi proses dan hasil yang dapat memengaruhi keefektifan forum multipihak dalam mencapai tata guna lahan berkelanjutan;
2. menganalisa bagaimana forum multipihak mengatasi isu ketimpangan pengaruh dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan.

Seberapa Efektif Forum Multipihak di Kalimantan Timur?

Hasil dari kelompok kerja SIPKEBUN yaitu *database* kegiatan petani kelapa sawit mendapat pengakuan dan dukungan dari Kementerian Pertanian. Sehingga hasil dari MSF memiliki dampak yang lebih luas melebihi tingkat kabupaten. Perwakilan dari kementerian yang menjadi responden studi ini menyatakan rencana untuk mereplikasi format dan proses pembentukan *database* bagi petani-petani komoditas penting lainnya, seperti kopi dan padi, di Indonesia. Delapan responden pemerintah dan juga perwakilan dari perusahaan mengakui bahwa informasi di dalam *database* dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena perannya dalam menggambarkan kondisi petani kelapa sawit di Kabupaten Seruyan.

MSF juga berkeinginan untuk meningkatkan praktik perkebunan berkelanjutan para petani dengan membentuk fasilitas pertanian yang menyediakan kebutuhan pertanian seperti bibit dan pupuk dengan harga yang lebih murah serta mengadakan pelatihan terkait dengan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Bantuan bagi para petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO/RSPO juga akan diberikan oleh MSF sehingga dapat membuka kesempatan bagi para petani untuk bergabung dalam rantai pasok UNILEVER. Namun, pada saat pengambilan data, proses sertifikasi mengalami tantangan dikarenakan banyaknya praktik perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di wilayah kawasan hutan negara, sehingga kesulitan untuk mendapatkan legalitas terkait aktivitas perkebunan mereka.

Berdasarkan responden riset ini, salah satu tantangan dalam proses MSF adalah menjaga komitmen dan dukungan perusahaan terhadap MSF. Menurut pegawai pemerintah setempat, sulitnya mendapatkan kehadiran dan partisipasi penuh dari perusahaan menjadi kondisi yang berbanding terbalik dengan komitmen awal yang mereka bentuk dalam MSF. Perwakilan dari asosiasi bisnis yang tidak tergabung di dalam MSF menyatakan bahwa beberapa informasi yang diminta untuk *database* bersifat rahasia, seperti titik lokasi perkebunan, sehingga ditakutkan bahwa informasi tersebut akan disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan. Namun sebaliknya, sebuah perusahaan yang menjadi responden dan juga anggota MSF mengakui bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan skala kecil hingga menengah di dalam MSF merupakan suatu strategi mitigasi risiko bisnis, untuk menghindari kemungkinan adanya dampak negatif dari hasil MSF terhadap bisnis mereka.

Apakah Forum Multipihak Berhasil Mengatasi Isu Ketidaksetaraan?

Secara umum, anggota MSF – yang didominasi dari pemerintah daerah – menyatakan hasilnya yang berkeadilan, karena dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan para petani.

Walaupun petani lokal tidak berpartisipasi dalam MSF SIPKEBUN, tetapi berperan penting sebagai sumber pengumpulan data, pendaftaran dan penerima aktivitas peningkatan kapasitas yang disediakan dalam fasilitas pertanian. Adanya ketidakpercayaan petani terhadap proses pengambilan data dan ketakutan mereka karena pengalaman masa lalu, di mana kegiatan serupa menyebabkan hilangnya hak atas lahan mereka, membuat proses pengambilan data untuk *database* SIPKEBUN menjadi terhambat. Menurut seorang petugas dari INOBU, dibutuhkan waktu hingga 3 tahun untuk bisa bekerja sama dengan para petani.



Kesetaraan

80%

80% peserta mengakui bahwa MSF sudah setara atau sangat setara.



100%

Efektivitas

100% peserta mengakui bahwa MSF sudah efektif atau sangat efektif.

Lemahnya pelibatan petani di dalam proses MSF dapat berpotensi pada meningkatnya kesulitan aktivitas program ke depan, terutama dalam pembentukan koperasi petani dan proses pengajuan dan implementasi dari sertifikasi ISPO/RSPO. Tidak adanya perwakilan petani di dalam MSF menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kebutuhan dan kekhawatiran petani. Padahal, MSF dapat menjadi jembatan penghubung bagi petani dengan kelompok pemangku kepentingan yang jarang ditemui namun membuat keputusan yang memengaruhi petani.

Studi ini menemukan bahwa salah satu tujuan MSF untuk membuat *database* SIPKEBUN membuat pelibatan pemangku kepentingan menjadi terbatas pada mereka yang dianggap relevan oleh penyelenggara MSF dalam memberikan kontribusi teknis maupun terhadap proses pengambilan keputusan forum, semisal menyelesaikan proses perubahan lahan petani dari kawasan hutan negara ke 'areal penggunaan lain'.

Rekomendasi

- *Hak atas lahan*: agar petani kelapa sawit bisa mendapatkan status legal atas lahannya dan juga berhasil mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO, pemerintah Seruyan perlu mengambil langkah untuk menyelesaikan proses perubahan lahan petani dari kawasan hutan negara ke 'areal penggunaan lain'.
- *Kebutuhan dan kepentingan bersama dan perluasan representasi pemangku kepentingan*: keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti petani – beserta kebutuhan dan kepentingannya – dapat meningkatkan legitimasi dari proses dan hasil MSF sekaligus memperkuat pengambilan keputusan.
- *Pendekatan interkultural*: pelibatan petani tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga memiliki kedudukan yang sama dalam mengembangkan *database*, akan menjadi kunci dalam pencapaian sertifikasi, mengingat pembentukan koperasi petani ke depannya tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari mereka.

Publikasi ini merupakan bagian dari proyek **Mengintegrasikan REDD+ ke dalam tujuan-tujuan pembangunan pada tingkat lanskap: Peran forum multi pihak dalam yurisdiksi pemerintah daerah.**

Kontak

Anne M. Larson: a.larson@cgiar.org | Juan Pablo Sarmiento Barletti: j.sarmiento@cgiar.org



RESEARCH
PROGRAM ON
Policies,
Institutions,
and Markets

Program Penelitian CGIAR mengenai Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM) telah memimpin penelitian berorientasi-aksi dalam melengkapi para pengambil keputusan dengan bukti yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pangan dan pertanian yang memberikan pelayanan lebih pada kepentingan produsen dan konsumen miskin, baik laki-laki maupun perempuan. PIM menggabungkan sumber daya dari pusat CGIAR dan banyak mitra internasional, regional, dan nasional. Program ini dipimpin oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). www.pim.cgiar.org



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA). FTA adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.

Penelitian FTA didukung oleh Dana Perwalian CGIAR: cgiar.org/funders/



Norad



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

cifor.org | forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

